

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Organisasi merupakan kumpulan dari beberapa orang dalam suatu wadah untuk mencapai tujuan yang sama artinya bahwa eksistensi organisasi sangat berperan penting terhadap suatu perjuangan untuk melakukan perubahan global berdasarkan tujuan dan kepentingan sesuai dengan kesepakatan bersama dalam suatu organisasi. Organisasi sendiri mempunyai dua konsep yang *pertama* disebut konsep statis, adalah organisasi merupakan sebuah struktur atau jaringan hubungan tertentu. Dalam artian, organisasi adalah sekelompok orang yang terikat bersama dalam hubungan formal untuk mencapai tujuan bersama. Yang *kedua*, konsep dinamis yaitu organisasi merupakan sebuah proses dari aktivitas yang sedang berlangsung. Dalam artian, organisasi adalah proses pengorganisasian, pekerjaan, orang dan sistem. Hal ini berkaitan dengan proses menentukan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan sebuah kelompok.

Dalam menjalankan aktivitas organisasi mempunyai beberapa karakteristik antara lain ; *Pertama* Koordinatif, maksudnya adalah koordinasi dari berbagai aktivitas adalah sebuah hal penting dalam organisasi. Koordinasi akan membantu dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai kegiatan. Koordinasi juga menghindari penundaan pekerjaan. Berbagai fungsi dalam sebuah organisasi bergantung satu sama lain dan juga mempengaruhi satu sama lain; *Kedua* Divisi Pekerjaan, maksudnya organisasi berurusan dengan seluruh tugas. Berbagai aktivitas ditugaskan kepada para anggota yang berbeda untuk pencapaian efisien neraka. Namun hal ini bukan berarti bahwa satu anggota tidak dapat menjalankan banyak fungsi tetapi spesialisasi dalam pekerjaan yang berbeda sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas seseorang. Organisasi membantu dalam membagi pekerjaan menjadi aktivitas yang ditugaskan untuk individu berbeda. Dengan adanya pembagian tugas tersebut, penting bagi sebuah organisasi untuk memiliki manajemen yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan; *Ketiga* tujuan yang sama, maksudnya Semua struktur organisasi merupakan sarana menuju

pencapaian tujuan perusahaan yang sama. Struktur organisasi harus dibangun berdasarkan tujuan yang jelas, hal ini akan membantu pencapaian organisasi dengan benar; keempat hubungan kooperatif, maksudnya organisasi yang memiliki struktur yang baik akan menciptakan hubungan kerjasama di antara berbagai anggota organisasi. Sebuah organisasi tidak dapat dibentuk oleh satu orang, setidaknya membutuhkan dua orang atau lebih. Organisasi yang baik akan membantu menciptakan hubungan yang bermakna, hubungan harus vertikal dan horizontal di antara anggota dan di berbagai divisi. Struktur organisasi harus dirancang agar dapat memotivasi anggota untuk melakukan bagian pekerjaan masing-masing; kelima Hubungan otoritas-tanggung jawab yang ditetapkan dengan baik, maksudnya Sebuah organisasi terdiri dari berbagai posisi yang diatur dalam hierarki dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Tentunya selalu ada otoritas pusat untuk organisasi yang baik. Hirarki posisi dalam organisasi menentukan garis komunikasi dan pola hubungan.

Parameter keberhasilan sebuah organisasi ditentukan oleh banyak faktor, mulai dari faktor sumber daya manusia, sumber daya organisasi, sampai ketersediaan sumber daya lain yang berasal dari dalam maupun luar organisasi. Organisasi tumbuh dan berkembang sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Pengaruh internal maupun pengaruh eksternal. Mulai dari pengaruh positif maupun pengaruh negatif dari dalam dan luar lingkungan. Singkat kata organisasi tumbuh dan berkembang layaknya seorang manusia. Tumbuh membutuhkan pikiran, waktu, tenaga, dan sumber kebutuhan organisasi lainnya. Seiring dengan berkembangnya organisasi menuju arah pertumbuhan, tentu memerlukan banyak kebutuhan untuk memajukan organisasi. Semakin besar sebuah organisasi, semakin banyak pula tantangan dan masalah yang akan dihadapi. permasalahan organisasi itu bukanlah sesuatu yang merugikan, sebaliknya masalah-masalah itu adalah hal yang baik yang menunjukkan betapa dinamis dan adaptifnya suatu organisasi ini. Namun, semua berpulang pada penghuni rumah dari sebuah organisasi itu sendiri bagaimana dalam menyikapi berbagai persoalan dan tantangan yang datang itu, apakah akan disikapi secara positif atau negatif. Sebagai pengelola organisasi, sudah pasti beban terbesar untuk menyelesaikan

berbagai problem organisasi ada di pundak para pemegang keputusan (*decision maker*).

Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dapat dipahami merupakan kumpulan organisasi dalam skala besar karena terdiri dari bagian-bagian atau bisa disebut Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang menjalankan program atau kegiatan yang sudah menjadi agenda pemerintah daerah berdasarkan tingkat kewenangan masing-masing OPD. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan secara terukur merupakan upaya untuk memajukan masyarakat, karena apabila pembangunan daerah itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan daerah maka akan sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat daerah.

Sekretariat Dewan (SETWAN), yang merupakan bagian dari OPD mempunyai peranan penting adalah menjaga keseimbangan politik dan kepentingan antara pemerintah Daerah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif). DPRD merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah yang diberikan keleluasaan menurut ketentuan hukum untuk bertindak dan berbuat dengan berdasarkan standar hukum yang baik dan benar. Salah satu fungsi utama DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 293 ayat (1) Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbunyi DPRD mempunyai Fungsi legislasi adalah fungsi untuk membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah, Fungsi Anggaran adalah bahwa DPRD bersama-sama Kepala Daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, Fungsi pengawasan adalah fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah dan keputusan Bupati serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam era otonomi daerah saat ini, ada beban yang berat yang ditumpukan kepada Pemerintah Daerah (PEMDA) dan DPRD. Beban itu adalah upaya sejahteraan, menyerap dan menjalankan harapan dan keinginan masyarakat membentuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Untuk mendukung

pelaksanaan fungsi DPRD, dibantu oleh Sekretariat Dewan (SETWAN) Kabupaten Halmahera Barat. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang meliputi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Melihat kedudukan, tugas dan fungsi SETWAN Kabupaten Halmahera Barat maka dapatlah disimpulkan mempunyai peranan yang sangat penting dan turut menentukan efektifitas pelaksanaan fungsi DPRD. Oleh karena itu, untuk mewujudkan atau meningkatkan efektifitas DPRD maka SETWAN harus dapat berperan maksimal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Peranan SETWAN Kabupaten Halmahera Barat dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD, juga dilakukan upaya peningkatan kapasitas dan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) pegawai. Peningkatan kapasitas SDM pegawai dilakukan dengan jumlah dan mutu pegawai yang memadai, dimana sekarang ini setwan DPRD ditempatkan sebanyak 66 (enam puluh enam) orang pegawai yang sebagian besar berpendidikan Strata Satu (S1) dan memiliki kualifikasi kompetensi serta Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemberian pelayanan administrasi terhadap DPRD.

Berdasarkan pengamatan langsung oleh penulis ada indikator yang dapat menunjukkan belum maksimalnya peranan SETWAN Kabupaten Halmahera Barat dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD. Hal itu dapat ditunjukkan dengan masih adanya keluhan pimpinan dan anggota DPRD terhadap kinerja SETWAN dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD yang masih kurang efisien dan efektif, sehingga tidak tercapainya kinerja yang maksimal karena kurang adanya kesiapan SDM yang memadai. Seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Dewan Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2024,

pertanyaan oleh peneliti adalah menurut pendapat bapak apakah pelayanan administrasi yang telah dilakukan oleh Sekretariat Dewan telah menunjukkan kinerja yang baik dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Halmahera Barat ?

"pelayanan administrasi kesekretariatan sudah dilaksanakan dengan baik tetapi belum efektif, karena misalnya terkait dengan koordinasi penetapan agenda kerja anggota DPRD, yang terkadang sering molor (diundur) karena ada faktor-faktor internal seperti kegiatan partai yang bertabrakan dengan agenda Sekretariat Dewan yang akan sangat berpengaruh terhadap pelayanan administrasi yang sudah di agendakan oleh Sekretariat Dewan, dan juga dalam pelaksanaan tugas pelayanan administrasi lintas bagian belum maksimalnya ketersediaan Sumberdaya Manusia yang merata sehingga pekerjaan dilaksanakan lebih membutuhkan pengawasan dan koordinasi yang intensif" (Sekwan, 02 Mei 2024).

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dalam melaksanakan agenda pelayanan administrasi kesekretariatan dalam mendukung tugas dan fungsi (tupoksi) DPRD Kabupaten Halmahera Barat ada dua permasalahan yang sering terjadi sehingga mempengaruhi efektifitas kinerja pegawai SETWAN, antara lain *pertama* kegiatan yang penetapan waktu pelaksanaannya tergantung hasil koordinasi dengan DPRD dan penetapan pelaksanaan kegiatannya ditentukan oleh DPRD seperti sering terjadi penguluran waktu pelaksanaan penentuan waktu kegiatan seperti dalam melaksanakan kegiatan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platform Sementara (KUA PPS), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), KUA-PPS Perubahan, dan APBD Perubahan, yang alasannya adalah karena kegiatan tersebut bertentangan dengan kepentingan partai karena anggota DPRD tidak berada di tempat sehingga pelaksanaan rapat tidak memenuhi quorum. Apabila hal seperti ini terus terjadi maka akan sangat berpengaruh terhadap agenda Sekretariat Dewan karena pelaksanaannya tidak tepat waktu dan dalam membuat perencanaan kegiatan telah ditetapkan sebelumnya pada waktu diusulkan. *Kedua* ketika terjadi pelaksanaan tupoksi masing-masing bagian karena pelaksanaan kegiatan pegawai yang aktif hanya beberapa orang saja padahal jumlah pegawainya cukup banyak, hal ini disebabkan karena kualitas sumberdaya manusia yang terbatas, seperti dalam membuat surat-

menyurat yang menjadi kewenangan dari bagian umum dan perlengkapan tetapi praktek teknisnya yang mengerjakan bagian legislasi, selanjutnya misalnya dalam mendukung agenda kerja DPRD yang seharusnya keterlibatan Kepala Sub Bagian Kajian Perundang-undangan mempunyai peranan penting menyangkut penyediaan referensi kajian hukum yang diminta oleh DPRD sebagai sandaran dalam membuat Peraturan Daerah (PERDA), tetapi ketidak mampuan untuk melaksanakan tanggung jawabnya karena keterbatasan *basic* keilmuan, dampaknya ada rasa ketidak percayaan dari pimpinan maka biasanya tanggung jawab tersebut diserahkan kepada tim staf honor yang memang punya basic keilmuan hukum. Begi juga Kepala Sub Bagian Persidangan tugas utamanya adalah penanggungjawab dalam melaksanakan dan mengawasi jalannya persidangan dari persiapan sidang yaitu mensterilkan ruang sidang, memastikan kehadiran peserta sidang antara lain anggota DPRD, perwakilan eksekutif dan perwakilan yudikatif, unsur MUSPIDA dan para undangan serta menginventarisir kebutuhan sidang, menyiapkan pidato tua DPRD, tetapi dalam pelaksanaannya berdasarkan kebijakan pimpinan sering dilimpahkan kepada Kepala Sub Bagian Risalah, hal ini disebabkan secara realitas tidak mampu dalam melaksanakan tugas yang sudah menjadi tanggungjawabnya, karena sebenarnya bukan merupakan tanggungjawab Kepala Sub Bagian Risalah yang tugas utamanya adalah membuat risalah rapat. Kemudian bagian perencanaan tugas utamanya adalah membuat perencanaan program tetapi tidak dilaksanakan disebabkan karena tidak dapat melaksanakan tugasnya karena karena sumberdaya manusianya, maka agar perencanaan program ini harus dilaksanakan maka kebijakan pimpinan tugas dan tanggungjawabnya diserahkan kepada Kepala Sub Bagian Program dan Penganggaran yang sebenarnya bukan merupakan tanggungjawabnya. Sejalan dengan wawancara

Menjalankan tugas dan tanggungjawab SETWAN dinilai belum mencapai kinerja yang maksimal, apabila dilihat dari fenomena yang telah disebutkan sudah tentu hal ini sangat mempengaruhi kinerja pegawai Sekretariat Dewan, maka muncul pertanyaa peneliti bahwa sebenarnya faktor-faktor apa yang mempengaruhi sehingga terjadi tumpang tindih tupoksi di bagian-bagian dalam

Sekretariat Dewan untuk memahami dan menjalankan tugas serta tanggungjawabnya. Hal ini sejalan dengan penjelasan dari Kepala Bagian Umum dan Perlemgkapan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Pegawai Sekretariat Dewan

"kalau menurut saya ada beberapa faktor yang mempengaruhi Sehingga hal itu terjadi antara lain : 1. kurangnya pemahaman dan penerapan terhadap tugas pokok dan fungsi di masing-masing sub bagian. 2. keterbatasan Sumberdaya Manusia yang tersedia, artinya pegawai tersedia disetiap bagian tetapi yang melakukan pekerjaan tidak merata hanya segelintir pegawai yang loyal melakukan pekerjaan tersebut. 3. masih rendahnya motivasi dan disiplin kerja. 4 kurang memadainya jaringan internet. 5. sering mundurnya jadwal persidangan disebabkan masih adanya disiplin dari anggota dewan yang mengakibatkan pelaksanaan rencana kerja tidak sesuai rencana.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, judul yang akan disajikan dalam penulisan proposal ini adalah Kinerja Pegawai Sekretariat Dalam Mendukung Tugas, Fungsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

1.2. Perumusan Masalah

Seperti yang diketahui SETWAN Kabupaten Halmahera Barat yang merupakan bagian dari perangkat daerah mempunyai peranan vital dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Halmahera Barat maka dalam penulisan penelitian yang diangkat adalah : bagaimana Kinerja Pegawai Sekretariat Dewan dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam perspektif; 1. Keterbatasan sumberdaya manusia, 2. Disiplin dan motivasi kerja yang masih kurang, 3. Fasilitas pendukung yang tidak memadai, 4. Tumpang tindih tugas dan fungsi tupoksi, 5. Keterlamabatan dalam pelaksanaan tugas DPRD.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disajikan tujuan penulisan adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Pegawai Sekretariat Dewan dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas penulisan proposal ini dapat bermanfaat antara lain :

1. Manfaat Secara Akademik

Karya tulis ini dapat dijadikan referensi terkait dengan kinerja sumberdaya manusia dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas Dewan Perwakilan rakyat daerah kabupaten Halmahera Barat.

2. Manfaat Secara Praktis

Karya tulis ini dapat menambah khasanah berfikir dan pematangan pengetahuan tentang Sumberdaya manusia.